

I

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

# Krisis Listrik karena Konsumsi

## Wapres: Pemborosan Listrik Akan Ditindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, krisis listrik yang terjadi sekarang ini semata-mata karena faktor tingginya konsumsi listrik dibandingkan dengan kurangnya pasokan listrik yang diproduksi oleh PT Perusahaan Listrik Negara.

Menurut Wapres, krisis listrik sekarang ini bukan karena kecilnya subsidi pemerintah kepada PLN. "Ini bukan masalah subsidi. Subsidi itu sudah besar sekali. Akan tetapi, karena permintaan yang terlalu tinggi, padahal penambahan pembangkit, baru selesai tahun depan," ujar Wapres di Jakarta, Jumat (27/6).

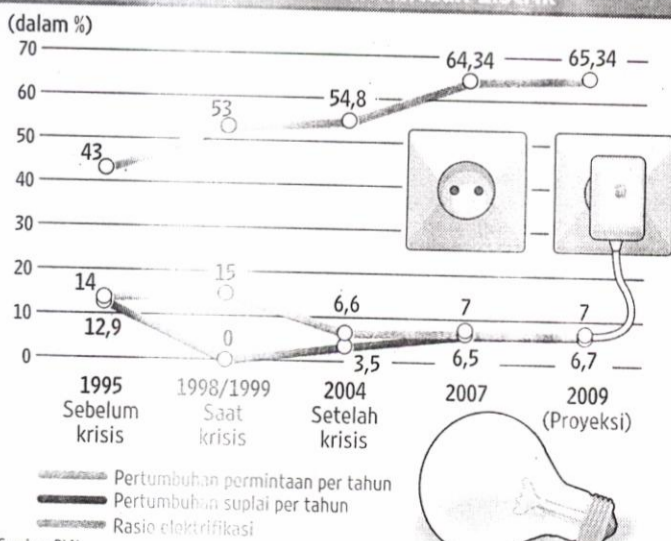
Meningkatnya konsumsi listrik, lanjut Wapres, ternyata lebih cepat dari perkiraan penyelesaian pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara atau yang lebih dikenal dengan proyek 10.000 MW. Hal tersebut disebabkan terjadinya pemborosan pemakaian daya listrik oleh masyarakat.

Pada saat yang sama, ada kerusakan di beberapa pembangkit listrik yang dimiliki PLN dan terhambatnya pasokan batu bara.

Wapres mengatakan, pemerintah akan mulai keras dan tegas bertindak terhadap pemborosan pemakaian listrik di rumah, perkantoran, mal, dan hotel. Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian proyek pembangkit listrik 10.000 MW.

"Saya akan panggil PLN agar sepenuhnya menjalankan efisiensi dan mengurangi kenyamanan dari pemborosan listrik. Jadi, ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, meningkatkan efisiensi

**Perkembangan Suplai dan Permintaan Listrik**



1

sebelum proyek listrik 10.000 MW selesai dan mengurangi kenyamanan pelanggan PLN karena yang bisa mengatasi krisis itu adalah proyek listrik 10.000 MW. Padahal, proyek itu baru berfungsi betul pada tahun 2010. Kalau tahun depan, baru tiga pembangkitnya saja yang bisa jalan," papar Wapres.

Wapres menambahkan, kalau perlu, pemerintah akan memberikan bonus kepada semua kontraktor yang bisa cepat menyelesaikan proyek 10.000 MW sebelum waktunya.

### PLN tidak cengeng

Wakil Direktur Utama PT PLN Rudiantara mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan kondisi menyeluruh kelistrikan tahun ini dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

"Dengan kapasitas pembangkit seperti ini dan biaya energi yang jauh di atas perkiraan, defisit akan terus terjadi kalau tidak diambil tindakan. Sekarang kebijakan apa yang akan diambil. PLN tidak cengeng dengan minta-minta subsidi. Tapi, kalau subsidi tidak ditambah, bagaimana dengan *cash flow* perusahaan, bagaimana dengan kebijakan energi pemerintah?" kata Rudiantara.

Ia mengatakan, dengan pertumbuhan kelistrikan di atas 5 persen, harga minyak di atas 130 dollar AS per barrel, dan harga batu bara di atas 100 dollar AS per ton, PLN akan mengalami kekurangan. "Kebijakan tarif ada pada pemerintah sebagai regulator sementara dari sisi ketersediaan energi, PLN tidak diproteksi," kata Rudiantara.

Dalam kondisi kapasitas pembangkit yang terbatas, menambah jumlah pelanggan bukannya menambah penerimaan PLN, tetapi justru menambah biaya pengeluaran bahan bakar.

Pemantauan *Kompas* di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemutusan arus listrik juga mengganggu aktivitas pelayanan di rumah sakit. Meski ada sumber energi cadangan berupa genset, penanganan terhadap pasien, khususnya pada unit darurat, terganggu. Kerugian nonfinansial pasien lebih tinggi ketimbang kerugian finansial rumah sakit.

Trisno Heru Nugroho, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, mengatakan, mulai April hingga pertengahan Juni tahun ini tercatat sudah delapan kali aliran listrik setempat terhenti. Lama waktu sekali padam mencapai 1 hingga 3,5 jam. Ironisnya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari PLN kepada rumah sakit sebelum pemutusan arus listrik.

"Tidak ada pemberitahuan kepada kami bahwa listrik akan padam. Kalau ada, kan, kami bisa bersiap-siap sebelum pemutusan arus listrik," ujarnya, Jumat.

Empat genset berkekuatan 2 megawatt yang dimiliki RS Sardjito harus dinyalakan serentak. Itu pun kekuatannya tidak bisa menyeluruh dan hanya dimanfaatkan untuk meng-cover sekitar 80 persen area. Genset dipakai untuk menerangi dan menghidupkan peralatan pada unit-unit vital, seperti *intensive care unit*. Sementara ruang atau lorong yang jarang dilalui terpaksa dibiarkan gelap.

Penggunaan genset juga terkendala biaya bahan bakar solar yang mencapai 600 liter per jam. Dari delapan kali pemadaman listrik, RSUP Dr Sardjito telah menghabiskan sekitar 7.100 liter solar.

"Untuk membeli solar sebanyak itu dan hanya untuk beberapa jam, kami mengeluarkan Rp 39 juta. Ini sangat membebankan mengingat tagihan listrik saja hanya Rp 400 juta per bulan. Tapi, kerugian terbesar justru dari nonfinansial," ujar Heru.

Ia mencontohkan, banyak pasien dan pengunjung yang protes, terutama saat dilangsungkan operasi atau ketika mereka sedang berada di dalam lift. "Durasi 10-15 detik tidak bisa dibilang sebentar kalau sedang ada operasi. Bayangkan kalau ada operasi kehamilan dan listrik mati mendadak. Bayi-bayi yang baru lahir perlu pemanasan tubuh yang konstan. Ruang gawat darurat juga harus dipasok listrik," ujarnya.

Di Surabaya, Direktur RSUD M Soewandi Lilian Anggraini mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang menggunakan peralatan berenergi listrik tidak bisa dilakukan, termasuk alat untuk memonitor jantung.

Pemutusan aliran listrik juga menyulitkan penanganan karena RSUD M Soewandi tidak memiliki genset untuk gedung tempat poliklinik penyakit dalam, jantung, dan paru-paru serta beberapa ruang rawat inap pasien dewasa.

Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Cissy Kartasmita memperkirakan pemakaian solar di rumah sakit itu meningkat hingga 30 persen dari pemakaian rata-rata 12.000 liter per bulan. Saat arus listrik putus selama enam jam pada akhir Mei lalu, RSHS membutuhkan solar tambahan hingga 2.000 liter.

Di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Kota Semarang, pemutusan arus menyebabkan rumah sakit harus menambah biaya ekstra untuk membeli solar guna menyalakan genset. Selama bulan Juni, RS tersebut mengalami sekitar 15 jam pemutusan arus listrik. "Genset yang kami miliki berdaya 400 kilovolt ampere (kVA). Setiap menyala satu jam, genset membutuhkan sekitar 100 liter solar," kata Mahadi, Kepala Bagian Rumah Tangga RSI Sultan Agung.

(BRO/FUL/WER/PRA/MHF/A07/A08/A09/OSA/HAR/DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: *Fu*

TAHUN 2008

## Berharap Asahan 1 atasi defisit listrik di Sumut

Oleh DORMAULINA SIDABUTAR  
Kontributor *Bisnis Indonesia*

**K**risis energi listrik di Sumatra Utara, sepertinya sedikit berkurang dengan akan beroperasinya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan 1 pada akhir 2009.

Apakah dengan beroperasinya PLTA Asahan 1, tidak akan ada lagi pemadaman listrik secara bergilir? Sejauh ini belum ada jaminan. Namun, setidaknya dipercaya bisa mengurangi defisit energi listrik.

PLTA Asahan 1 berkapasitas 2x90 megawatt (MW) yang

berlokasi di Porsea, Kabupaten Toba Samosir ini merupakan proyek independen power producer (IPP) yang dikendalikan PT Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN). Nantinya, PT PLN membeli energi listrik dari proyek Asahan 1 ini seharga US\$0,046 per kWh.

Menurut Project Director

BDSN Frans Wijaya, pelaksanaan konstruksi proyek PLTA Asahan 1 dipercayakan kepada China Huadian Engineering Corporation (CHEC) selaku kontraktor utama.

Saat ini, paparnya, pengerjaan proyek memasuki tahap pembangunan fisik meliputi pembangunan terowongan utama yang pengerjaannya sudah mencapai 4.150 meter dari 6.500 meter rencana panjang terowongan.

Untuk pengerjaan sipil dan elektro mekanikal telah mencapai 52,3%, di mana dari total tersebut sekitar 30% penger-

jaan elektro mekanikal. Sementara itu pengerjaan sipil berupa galian dan timbunan pembuatan gardu induk mencapai 75%.

"Sejauh ini semua proses pengerjaan proyek berjalan lancar sesuai rencana, sehingga diharapkan proyek ini dapat beroperasi akhir Desember

2009," ujarnya saat kunjungan proyek PLTA Asahan 1, belum lama ini.

### Defisit listrik

Kehadiran PLTA Asahan 1 itu memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat Sumatra Utara di tengah kondisi defisit energi listrik 120 MW yang mendera wilayah ini.

Vice President Director BDSN Husni Sabar mengungkapkan energi listrik yang dihasilkan PLTA Asahan 1 akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat ataupun industri

di wilayah Sumut.

Dari kapasitas terpasang sebesar 2x90 MW, Asahan 1 akan menghasilkan energi listrik sebesar 1.175 gigawatt hour (gWh) per tahun. Ditambah lagi tambahan energi sebesar 100 gWh per tahun.

"Artinya, pasokan energi listrik dari Asahan 1 akan banyak

## Beberapa hal penyebab krisis kelistrikan di Sumatra Utara

Sumatra Utara

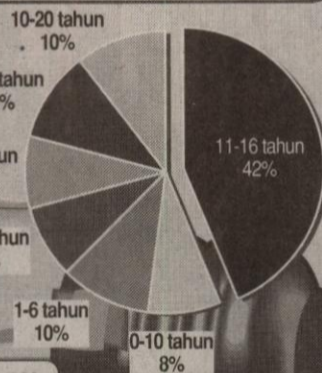
Tidak ada tambahan pembangkit baru yang signifikan dari 1995 sampai dengan 2006, sedangkan pertumbuhan beban rata-rata sekitar 8% per tahun.

Proyek pembangkitan sebesar 641 MW yang telah dikontrakan, ditunda pelaksanaannya sesuai dengan Keppres no. 39 tahun 1997 dan karena kondisi keamanan di NAD yaitu :

PLTU Sibolga "A"	: 200MW
PLTP Sarulla	: 165MW
PLTA Asahan I	: 180MW
PLTP Sibayak	: 10MW
PLTA Puesangan	: 86MW (karena kondisi keamanan di NAD)

Usia pembangkit

> 20 tahun	: 21%
18-20 tahun	: 18%
11-16 tahun	: 42%
1-10 tahun	: 1%



Substitusi pasokan bahan bakar HSD akibat menurunnya pasokan gas.

Sumber: Pemprov Sumut, 2008, diolah

BISNIS.FITRIYANA PULUNGAN

membantu mengurangi defisit energi listrik di wilayah Sumut," tuturnya.

Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Rudiantara menaruh harapan besar dengan selesainya PLTA Asahan 1. Dia mengatakan proyek itu sedikit banyak akan membantu sistem kelistrikan Sumut menjadi lebih baik dari kondisi sekarang.

Namun, buru-buru dia mengingatkan tambahan energi dari Asahan 1, tidak berarti menghilangkan begitu saja krisis energi listrik di Sumut.

"Masalahnya, permintaan listrik terus meningkat. Demikian pula kenaikan beban puncak yang kini sudah mencapai 1.100 MW," ujarnya.

Dia membeberkan fakta dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pertumbuhan konsumsi listrik secara nasional rata-rata di atas 5%.

Konsumsi itu belum termasuk konsumsi industri karena selama ini kelompok tersebut tidak lagi menjadi konsumen PLN.

Fakta lain, penambahan kapasitas dari IPP kurang lebih hanya sekitar 3.600 MW atau bertambah sekitar 16% dari total 25.000 MW kapasitas yang dibutuhkan.

"Jadi PLN tidak bisa menjamin, apalagi dalam konteks kelistrikan nasional yang *reserve margin*-nya hanya sekitar 25%. Idealnya harus ada cadangan sebesar 40%."

Anggota DPRD Sumut Budi Mulia Bangun berharap hadirnya PLTA Asahan 1 dapat membantu Sumut mengurangi krisis energi listrik yang selama ini telah menurunkan kualitas perekonomian daerah Sumut, terutama produktivitas industri dan dunia usaha yang banyak menggantungkan harapannya kepada energi listrik. (redaksi@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 29

TAHUN 2008

# Listrik Padam Pelayanan Umum Lumpuh

**PALANGKARAYA (MI):** Pelayanan umum seperti rumah sakit dan perkantoran negeri maupun swasta lumpuh akibat listrik padam pada jam-jam kerja di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Sejumlah perkantoran baik swasta maupun pemerintah lumpuh tidak bisa melakukan aktivitas kerja, kecuali secara manual. Begitu juga dengan sejumlah lampu pengatur jalan, padam yang berimbas pada rawannya kecelakaan.

Krisis listrik di Provinsi Kalimantan Tengah sudah pada tahap memprihatinkan. Pemadaman bukan saja dilakukan pada malam hari. Juga pada siang hari, selama 10 jam, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Pemadaman itu bukan jadwal pemadaman rutin.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah telah meminta PLN wilayah setempat menambah *genset*, agar pemadaman tidak sering terjadi.

Namun, instansi tersebut tidak bisa berbuat banyak karena kerusakan itu terjadi di sentral-

►► 'Rumah sakit sebenarnya mempunyai *genset*. Tetapi alat itu untuk keperluan darurat saja, bukan operasional sehari-hari.'

**Rosihan Adhani -  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kalimantan Selatan**

nya. Yakni, di PL-TU Asam-Asam Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Saat ini kita masih tergantung pada mereka," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran di Palangkaraya, kemarin.

#### Tidak beroperasi

Sementara itu, di Kalsel tercatat ada 14 rumah sakit pemerintah dan 14 rumah sakit swasta yang terganggu aktivitas pelayanannya.

Ada yang terhambat dalam hal pengembangan fasilitas kesehatan. Bahkan, sejumlah rumah sakit baru tidak dapat beroperasi karena PLN tidak memberi jatah listrik.

RS Pahlawan, Hulu Sungai Selatan, misalnya, sejak berdiri awal 2008 tidak dapat beroperasi karena ketiadaan aliran listrik. Demikian juga dengan RS Hasan Basry, juga di Hulu Sungai Selatan yang

direlokasi, juga terganggu operasionalnya.

Hal serupa juga terjadi pada RS Balangan, di Kabupaten Balangan, hingga kini belum mendapatkan jatah pasokan listrik PLN. Sejumlah rumah sakit lain yang rencananya akan melakukan penambahan daya juga ikut terganggu.

"Rumah sakit sebenarnya mempunyai *genset*. Tetapi alat itu untuk keperluan darurat saja, bukan operasional sehari-hari," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Rosihan Adhaji.

Di sisi lain, Wakil Direktur RS-

UD Ulin Banjarmasin, Habib Ali, mengatakan saat ini rumah sakit tipe B pendidikan terbesar di Kalimantan itu terpaksa harus mematikan aliran listrik di sejumlah ruangan termasuk ruangan pasien. "*Genset* kita tidak cukup besar, sehingga sejumlah ruangan harus

dimatikan," katanya.

Diakuinya, jadwal pemadaman yang kerap tidak menentu juga sering menyebabkan kerusakan peralatan medis, bahkan peralatan kamar operasi, sehingga rumah sakit merasa dirugikan.

Kerapnya pemadaman bergilir yang terjadi, ujar Rosihan, menyebabkan rumah sakit terpaksa menunda rencana pengembangan fasilitas baru pelayanan kesehatan. Terutama pembelian peralatan baru. Pihak rumah sakit juga menelan kerugian akibat terjadinya pembengkakan biaya operasional dari *genset*, konsekuensi pembelian BBM yang tinggi.

Tidak termasuk kerusakan peralatan komputer, monitor, maupun alat-alat untuk kepentingan medis lainnya yang harganya ratusan juta rupiah. (SS/DY/N-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

## Mengentaskan Kemiskinan Lewat Pembangunan Energi

PEMERINTAH, melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) terus berupaya mengurangi angka kesenjangan atau disparitas antara daerah maju dengan daerah tertinggal. Hal ini, diyakini penting, mengingat kesejahteraan, pelayanan, akses serta pembangunan menjadi hak dari semua masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat di wilayah atau daerah tertinggal.

Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyebutkan, terdapat 38.232 (54,14%) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03) kategori maju dan 1.493 (2,11%) kategori sangat maju. Sementara desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86%) yang terdiri dari 29.634 (41,97) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89%) kategori sangat tertinggal. Ketimpangan inilah yang menjadi komitmen dari PDT untuk melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal.

Sementara itu, fakta tentang desa tertinggal menyebutkan, desa belum dapat dilalui mobil sebanyak 9.425 desa, desa belum ada sarana kesehatan sejumlah 20.435 desa, desa belum ada pasar permamen sebanyak 29.421 desa, desa belum ada listrik sebanyak 6.240 desa. Sementara rata-rata keluarga miskin di desas tertinggal adalah 46,44% dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46.

"Besarnya disparitas antara desa maju dan desa tertinggal, banyak disebabkan masing-masing sektor (departemen teknis) yang berjalan dengan sendiri-sendiri," kata Heru Jowono.

Selama ini, lanjut dia, pembangunan dinilai belum berjalan partisipatoris, dalam arti melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu stake holder utama pembangunan itu sendiri. Pembangunan desa juga dinilai belum terintegrasi antar berbagai sektor dan bidang pembangunan serta berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan desa belum optimal menekankan *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

Dengan demikian, kata Heru, menjadi amat penting bagi pemerintah dan semua komponen bangsa termasuk swasta turut berperan aktif mendorong masifikasi pembangunan daerah tertinggal. Salah satu hal penting dilakukan, menggali potensi energi daerah tertinggal sehingga memiliki sinkronisasi dengan upaya mendorong kemandirian energi secara nasional, baik berasal dari perut bumi maupun energi hasil olahan.

Apalagi, terdapat ribuan desa di daerah tertinggal yang belum mampu mendapatkan akses tenaga listrik dari PLN. Pemerintah melalui KPDT telah menjembatani membangun program listrik desa yang berbasis energi surya (Pembangkit Listrik Tenaga Surya-PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

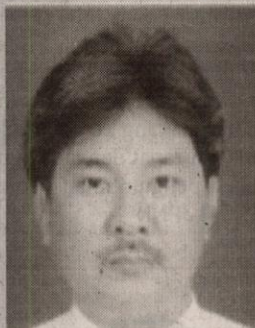
4

Kontekstualisasinya untuk mendorong kegiatan produktif masyarakat, seperti kerajinan, pendidikan, kesehatan, pasar desa dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Artinya, kata Heru, upaya mendorong kemandirian energi di daerah tertinggal akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan meningkatnya kegiatan produktif masyarakat setempat.

Apalagi, potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah tertinggal pun amat besar. Baik itu, energi surya, angin maupun air, batubara serta berbagai energi bersumber dari perut bumi lainnya. "Nah, paling tidak pemerintah bisa mengalakkan program penanaman berbagai jenis tanaman sebagai salah satu bahan baku untuk membuat energi terbarukan yang berbasis tanaman atau energi hijau," katanya.

Tentu saja, lanjut dia, harus disadari betul, semua potensi energi tersebut harus

dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Termasuk sumber energi yang tersimpan didalam perut bumi. Dalam kaitan itu, paradigma pengelolaan sumberdaya harus lebih lebih berorientasi kebutuhan dalam negeri, khususnya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. ■ ZK



Nama : Heru Julianto Juwono  
Tempat, tanggal lahir : Juwana, 27  
Juli 1956  
Status perkawinan : Menikah.

#### PENDIDIKAN

- Sarjana (S1) Teknik Sipil 1976-1981 Universitas Brawijaya, Malang
- Program Diploma II Akuntansi 1979-1980 Universitas Brawijaya, Malang
- Magister (S2) Manajemen Konstruksi 2007-... Institut Teknik Nasional, Malang ...

#### PEKERJAAN / AKTIVITAS

- Staf khusus Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
- Staf pengajar/dosen Institut Teknologi Nasional (ITN), Malang
- President/Chairman TEHATE Group (lebih dari 15 perusahaan)

#### AKTIVITAS KEMASYARAKATAN:

- Pendiri Aspatindo (Asosiasi Pabrik Tower seluruh Indonesia)
- Dewan Penasehat DPD HKTI Jateng, Pemuda Tani Jawa Tengah,
- Anggota Pusat Sanggar Kebangsaan
- Bendahara Pusat IKA-Unibraw (Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Malang)
- Pendiri Yayasan Putri Mahkota (sekolah murah; panti jompo; pendidikan khusus)

4

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

## Sumber Energi Melimpah Kok, Listrik Mati Melulu

**Jakarta, RM.** Kebiasaan PLN mematikan aliran listrik secara bergilir menimbulkan kekesalan para pelanggannya.

"Karena PLN sering memadamkan listrik, banyak kerugian yang dialami pelanggan akibat tidak bisa melakukan usaha yang membutuhkan listrik," kata Yanto, pengusaha jasa pengiriman barang industri.

Menurut Yanto, pemadaman listrik membuat usahanya terganggu karena fasilitas penunjang seperti komputer dan jaringan internet tidak bisa beroperasi.

"Tanpa komputer dan jaringan internet, kita tidak bisa menerima order yang dikirim melalui email. Selain itu, pemberkasan dan data order pelanggan yang sudah disimpan di komputer tidak bisa diakses. Mau nggak mau kita kelimpungan dan pekerjaan tertunda," keluh warga Tanjung Priok, Jakarta Utara ini.

Karena sering merugi, Yanto meminta PLN agar tidak terlalu lama apabila melakukan pemadaman listrik bergilir. "Makin lama lampu mati, makin tekor usaha kami."

Sementara itu, anggota DPR binggung melihat PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini.

Zulkifli Hasan, Ketua Kraksi Partai Amanat Nasional misalnya mempertanyakan sikap PLN

yang sering melakukan pemadaman listrik. Padahal, kata dia, sumber daya energi utama PLN seperti batubara dan gas melimpah ruah di Indonesia.

Kata dia, saking melimpahnya batubara dan gas di Indonesia, membuat para pengusaha getol mengekspornya.

"Bagaimana bisa PLN malah kekurangan stok energi batubara dan gas. Ini membingungkan."

Agar PLN tidak kekurangan stok batubara dan gas, lanjutnya, ada beberapa cara yang perlu ditempuh. Antara lain, meminta kepada pengusaha jangan mengekspor batubara dan gas sebelum kebutuhan dalam negeri tercukupi.

"Jangan batubara dan gas yang melimpah dijadikan alat untuk memperkaya pribadi-pribadi, sedangkan rakyat mengalami kerugian.

Pengusaha harus rela berkorban untuk mensubsidi kebutuhan rakyat," sarannya.

Zulkifli yakin, apabila sumber daya alam seperti batubara dan gas dikelola dengan baik, maka pemadaman listrik tidak bakal terulang. "PLN kan sering melakukan pemadaman akibat pasokan batubara dan gas tidak berjalan baik. Entah itu disebabkan pengusaha atau pun pihak tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan," katanya. ■ ARF

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

# DPRD Kabupaten Tangerang akan Selidiki Proyek PLTU

**Ada kesan pemkab terburu-buru melaksanakan proyek ini.**

TANGERANG — DPRD Kabupaten Tangerang akan menyelidiki proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah warga yang tinggal di tanah seluas 22 hektare itu terancam tidak mendapatkan ganti rugi.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang, Anugrah, mengatakan, salah satu alasan penyelidikan, yaitu karena 14 warga yang tinggal di tempat tersebut adalah penggarap. "Kami akan menyelidiki sejauh mana warga memiliki hak atas tanah tersebut," katanya kepada *Republika*, Jumat (27/6).

Ia mengatakan, tanah tersebut telah digarap dan ditempati warga sejak tahun 1950-an, akan tetapi lokasi terse-

but sebagian besar dimiliki oleh Perum Perhutani. "Yang jadi pertanyaan adalah jika tanah tersebut milik Perhutani, mengapa warga meminta ganti rugi?" kata Anugrah. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang akan mencari tahu status lahan dari Perum Perhutani, PLN, Departemen Kehutanan, dan Pemkab Tangerang.

DPRD, kata dia, akan bertindak sebagai fasilitator antara warga dan PLN. "Sejauh ini PLN hanya memberi uang kerohiman yang diserahkan melalui Perhutani," katanya. Namun, setelah warga menuntut, akhirnya PLN mau memberikan ganti rugi tetapi tidak dalam hitungan meter persegi. "Kami akan jadi fasilitator karena selama ini warga selalu menuntut uang ganti rugi," katanya.

Anugrah mengatakan, SK Bupati Tangerang tanggal 18 Juni 2008 memang menyebutkan jika tanah milik negara tidak bisa dicarikan ganti rugi. "Tetapi, jangan lupa bahwa pemkab telah menabrak Perda Nomor 5/2002

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," katanya. Ia mengungkapkan pula, ada kesan pemkab terlalu terburu-buru melaksanakan proyek ini.

Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Perum Perhutani, Andi Minawarman, mengatakan, dia hanyalah pelaksana alih fungsi lahan yang merupakan hutan lindung tersebut. "Kami hanya pelaksana saja, segala keputusan berada di tangan Departemen Kehutanan," katanya. Namun, ia menyatakan, selama ini warga yang tinggal di tempat tersebut selalu membayar kewajiban kepada Perum Perhutani.

Sebelumnya, Ketua Pansus Revisi RTRW DPRD Kabupaten Tangerang, Syarifullah, mengaku geram saat menyortir proyek PLTU ini. Menurutnya, pemkab tidak pernah melibatkan DPRD dalam membahas proyek PLTU senilai Rp 8 triliun tersebut.

PLTU berkapasitas 3 x 300 megawatt tersebut merupakan proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan

dibangun di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Pembangunan ini adalah upaya percepatan diversifikasi energi yang akan dilaksanakan di tiga daerah, yaitu Kemiri, Suralaya, dan Labuan.

Awalnya, PLTU akan dibangun di Teluk Naga, akan tetapi berdasarkan hasil presentasi pembangunan PLTU pada 17 Juli 2007 lalu disepakati ada perubahan lokasi. Akhirnya, lokasi dipindahkan ke Desa Lontar, Kecamatan Kemiri. Kapasitas awal sebanyak 2 x 300 megawatt pun diubah menjadi 3 x 300 megawatt. Dana pembangunannya yang senilai Rp 8 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ■ 066

## Fakta Angka

### Rp 8 Triliun

Dana proyek pembangunan PLTU di Desa Lontar, Kabupaten Tangerang.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : //

TAHUN 2008

# BNI dan BRI Danai *Fast Track* PLN Rp 2,15 T

Oleh Rizal Calvary

▶ JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mendanai proyek PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) *fast track* 10 ribu Megawatt tahap satu sebesar Rp 2,15 triliun.

BNI dalam proyek itu berkontribusi Rp 1,1 triliun dan BRI sebesar Rp 1,05 triliun.

"Kami berpartisipasi senilai Rp 1,1 triliun," kata Direktur Korporasi BNI Krishna Suparto kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (26/6).

Krishna mengatakan, kendati proyek tersebut membutuhkan pendanaan valuta asing (valas), pihaknya hanya menyiapkan pendanaan dalam rupiah.

Direktur Bisnis dan Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengatakan, BRI menyiapkan dana sebesar Rp 1,05 tri-

liun untuk mendanai proyek tersebut.

Pinjaman yang dikucurkan dua bank BUMN tersebut merupakan bagian dari pendanaan lima PLTU senilai Rp 5,71 triliun yang sebelumnya ditekankan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Mega Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk belum lama ini.

Sementara itu, PLN juga tengah menjajaki pinjaman valas sebesar US\$ 288,5 juta ke BNI untuk meningkatkan pendanaan PLTU Labuan-Banten.

"Pinjaman baru ini akan



■ Krishna Suparto

memudahkan kami dalam hal pendanaan," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar.

Namun ketika dikonfirmasi ke BNI, perseroan mengaku belum mendapat penawaran dari PLN. "Kami belum mendapat penawaran apa-apa," kata Krishna.

PLTU Labuan membutuhkan dana sebesar Rp 8,3 triliun yang terdiri atas pinjaman valas US\$ 333,4 juta dan Rp 1,5 triliun.

Sejauh ini, PLTU Labuan baru mendapat pendanaan sebesar Rp 1,1 triliun dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI. BCA menjadi pemimpin sindikasi kredit untuk PLTU Labuan 2 x 315 MW itu.

PLN setidaknya memerlukan dana Rp 47 triliun atau US\$ 5,2 miliar untuk mendukung proyek listrik 10 ribu MW tersebut. Sejauh ini, dana yang cair sudah lebih dari 50% atau sebesar Rp 28,6 triliun (US\$ 3 miliar) untuk delapan proyek PLTU.

Delapan lainnya bernilai Rp 18,4 triliun atau sebesar US\$ 2 miliar.

Kendati proyek tahap pertama belum rampung sumber pendanaannya, pemerintah telah meluncurkan tahap kedua sebesar 27.000 MW dengan nilai proyek Rp 100 triliun. Sebagian pendanaan proyek tersebut didapat dari perbankan dan penerbitan obligasi global. PLN juga menjajaki pinjaman dari Bank of China dan China Exim Bank untuk proyek tersebut.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

■ RESTRUKTURISASI UTANG BBM PLN

## Pertamina Putuskan Nasib Utang BBM PLN

JAKARTA. Penyelesaian pembayaran utang PT PLN kepada PT Pertamina mulai menunjukkan titik terang. Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akhirnya menyepakati restrukturisasi utang PLN untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina yang pada posisi 30 April 2008 lalu telah mencapai Rp 12,9 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Frederick Siahaan mengatakan, sesuai kesepakatan dengan direksi lama PLN, utang sebesar Rp 12,9 triliun itu akan direstrukturisasi melalui dua cara. *Pertama*, sebesar Rp 7,9 triliun akan dibayarkan dari sisa subsidi PLN yang belum dibayar pemerintah. Langkah ini akan dilakukan sampai akhir 2008. *Kedua*, sisanya sebesar Rp 5 triliun akan direstrukturisasi dengan menjadikannya surat utang ber-tenor lima tahun dengan bunga SBI plus 250 basis poin, dan akan diangsur sebesar Rp 500 miliar per semester. Jadi, ada Rp 5 triliun dalam bentuk surat utang yang bisa diperjualbelikan," jelas Frederick, Jum'at (27/6) kemarin.

Kedua pola restrukturisasi melalui surat hutang dan peng-

ambilan jatah subsidi PLN ini sudah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar Kamis (26/6) lalu.

Frederick menegaskan, Pertamina tidak akan menjual surat utang ini di bursa efek. Soalnya, surat utang ini bukan obligasi. Pertamina mengaku baru akan menjual jika membutuhkan dana segar. "Surat utang ini kita pegang hanya untuk kebutuhan kritis. Saat mendesak butuh dana kontan yang mendadak, kita akan menjual surat utang tersebut," katanya.

PLN sebenarnya keberatan dengan opsi pembayaran utang lewat penerbitan obligasi ini. Pasalnya, PLN tak ingin ada implikasi buruk dengan pengalihan obligasi ke pihak lain. "Kami masih mempertimbangkan implikasinya terhadap PLN," kata Rudiantara, Wakil Direktur Utama PLN April lalu.

Apalagi, opsi ini masih terganjal aturan larangan transaksi obligasi antara dua perusahaan dengan pemilik sama. Maklum, PLN dan Pertamina sama-sama pelat merah.

Gentur Putro Jati

8

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2008

## Pasok ke PLTU Cilacap segera normal

Oleh M. MUNIR HAIKAL  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara memastikan tunggakan utang kepada PT Adaro Indonesia untuk pembelian batu bara bagi kebutuhan PLTU Cilacap telah terselesaikan.

Wadirut PLN Rudiantara mengatakan jumlah utang yang dilunasi melebihi Rp100 miliar.

Seiring dengan selesainya pembayaran utang PLTU Cilacap terhadap PT Adaro Indonesia, pasokan batu bara kembali mengalir ke pembangkit listrik tersebut.

Adaro telah menghentikan pasokan batu bara akibat kemelut utang antara PT Segara Sumber Prima, pengelola PLTU Cilacap, dan pemasok komoditas itu.

"Jumlah utangnya kemarin sudah berkurang menjadi Rp60 miliar dan terakhir saya dengar sudah dilunasi," ujarnya, kemarin.

Artinya, tutur dia, pasokan batu bara terhadap PLTU Cilacap sudah bisa pulih kembali, sehingga pasokan listrik bisa berjalan normal.

Namun, Rudiantara mengingatkan kejadian ini tidak boleh terulang lagi terhadap produsen listrik swasta (*independent power producer/IPP*).

"Kami memiliki hubungan baik dengan Adaro dan permasalahan ini sudah kami bicarakan dengan mereka. PLN tentu tidak bertanggung jawab terhadap masalah pembayaran ini karena yang seharusnya membayar adalah IPP, kepentingan kami adalah dari sisi pelayanan."

Dia mengingatkan kalau PLN ikut campur terhadap penyelesaian utang dengan membantu penyediaan dana talangan, bisa dipastikan IPP yang lain meminta hak yang sama.

Namun, Rudiantara membuka kemungkinan pembayaran terhadap PLTU Cilacap dipotong terlebih dahu-

lu oleh Adaro, sehingga kelanjutan pasokan batu bara tetap berlangsung.

"Kami *kan* sudah menjalin kontrak dengan PLTU Cilacap dengan level harga tertentu. Bisa saja bagian dari pembayaran untuk Adaro dipotong terlebih dahulu."

Sejak terhentinya pasokan batu bara, PLTU itu terpaksa harus menghemat konsumsi dengan hanya mengoperasikan satu unit turbin dengan kapasitas tersalur hanya 260 megawatt (MW). Bahkan, produksi listrik yang dihasilkan telah dipangkas menjadi hanya 100 MW hingga 200 MW.

PLTU dimiliki oleh Sumber Segara yang merupakan hasil kerja sama antara anak perusahaan PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Sumberenergi Sakti Prima (PT SSP). PJB memiliki 49% saham dan sisanya dimiliki oleh SSP. (*munir.haikal@bisnis.co.id*)